

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SMPN 11 KOTA JAMBI

*Husni Sabil*

*Dosen Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jambi  
e-mail: sabilmath@gmail.com*

### **Abstrak**

Konsep desentralisasi pendidikan mengusulkan sebuah model penyelenggaraan pendidikan yang dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mendesentralisasikan kekuasaan/kewenangan, pengetahuan, informasi, dan penghargaan kepada sekolah. Melalui MBS sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip-prinsip dan karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS) yang diimplementasikan di SMPN 11 Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini untuk mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 11 kota Jambi (sebelumnya berstatus Sekolah Standar Nasional). Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil akhir dari penelitian lapangan disimpulkan bahwa pelaksanaan MBS di SMPN 11 kota Jambi sudah sesuai. Artinya penerapan MBS di tersebut telah sesuai dengan teori-teori yang berlaku, khususnya MPMBS yang sedang diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan rata-rata kadar implementasi dengan  $\bar{X}=66,44$ , serta rata-rata kadar implementasi untuk masing-masing indikator prinsip-prinsip MBS, karakteristik MBS dan Komponen desentralisasi dengan rata-rata masing-masing indikator adalah 65,69, 68,01, dan 65,63. Kadar implementasi yang masih rendah, yaitu : 1) Keterbukaan manajemen, 2) Kewenangan dan Kemandirian, 3) Fleksibilitas pengelolaan, 4) Kekuasaan dan informasi, 5) Kewenangan mengelola keuangan. Sebaliknya yang tergolong tinggi adalah : 1) Kewenangan mengembangkan tujuan pembelajaran serta strategi yang efektif, 2) Output yang diharapkan dari proses pembelajaran, 3) Kewenang mengembangkan kurikulum muatan local, 4) Penyelenggaraan proses belajar mengajar.

**Kata Kunci** : *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dunia, pendidikan dituntut memberikan kontribusi yang berarti dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Keberhasilan dunia pendidikan yang menjadi harapan masyarakat sangat tergantung dengan sistem pendidikan baik secara nasional, daerah maupun wilayah kota/kabupaten.

Penyelenggaraan pendidikan sentralisasi yang selama ini diterapkan di Indonesia telah melahirkan masalah pokok pendidikan. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pusat tersebut, terdapat banyak kelemahan. Menurut Slamet kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: keputusan pusat sering kurang sesuai dengan kebutuhan sekolah; administrasi berlebihan yang dikarenakan lapis-lapis birokrasi yang terlalu banyak telah menyebabkan kelambanan dalam menangani setiap permasalahan, sehingga menyebabkan kurang optimalnya kinerja sekolah; dalam kenyataan, administrasi telah mengendalikan kreasi; proses pendidikan dijalankan dengan undermanaged sehingga menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang rendah; dan manajemen berbasis pusat tidak saja menumpulkan daya kreativitas sekolah, tetapi juga mengikis rasa kepemilikan warga sekolah terhadap sekolahnya.

Konsep desentralisasi pendidikan mengusulkan sebuah model penyelenggara-an pendidikan yang dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management). Dalam pelaksanaan model tersebut sekolah memiliki otonomi yang luas dalam penyelenggaraan pendidikan, hal ini sejalan dengan pendapat Priatmoko bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mendesentralisasikan kekuasaan/kewenangan, pengetahuan, informasi, dan penghargaan kepada sekolah. Melalui MBS sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah. Tujuan MBS adalah meningkatkan kinerja sekolah dan terutama kinerja belajar siswa menjadi lebih baik.

Melalui strategi “desentralisasi pemerintahan di bidang pendidikan”, Depdiknas tidak hanya berkepentingan dalam mengembangkan kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan, tetapi juga berkepentingan dalam mewujudkan otonomi satuan pendidikan, Depdiknas memiliki keleluasaan untuk membangun kapasitas setiap penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah-sekolah. MBS mengembangkan satuan-satuan pendidikan secara otonom karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui operasional pendidikan. Sesuai dengan strategi ini

sekolah bukan bawahan dari birokrasi pemerintah daerah, tetapi sebagai lembaga profesional yang bertanggung jawab terhadap klien atau stakeholder yang diwakili oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tidak hanya diukur dari pendapat para birokrat, tetapi dari kepuasan masyarakat atau stakeholder. Fungsi pemerintah adalah fasilitator untuk mendorong sekolah-sekolah agar berkembang menjadi lembaga profesional dan otonom sehingga mutu pelayanan mereka memberi kepuasan terhadap komunitas basisnya, yaitu masyarakat.

Slamet berpendapat bahwa sekolah paling memahami permasalahan disekolahnya. Karena itu, sekolah merupakan unit utama yang harus memecahkan permasalahannya melalui sejumlah keputusan yang dibuat "sedekat" mungkin dengan kebutuhan sekolah. Lebih khusus lagi Slamet menyatakan bahwa perubahan di sekolah akan terjadi jika semua warga sekolah ada "rasa memiliki" dan "rasa memiliki" berasal dari kesempatan berpartisipasi dalam merumuskan perubahan dan keluwesan untuk mengadaptasikannya terhadap kebutuhan individu sekolah. Rasa memiliki ini pada gilirannya akan meningkatkan pula rasa tanggungjawab.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa makin tinggi keterlibatan warga sekolah pengambilan keputusan, maka warga sekolah tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki yang semakin besar yang dibarengi dengan rasa tanggungjawab yang semakin tinggi.

Dengan MBS, pemecahan masalah internal sekolah, baik yang menyangkut proses pembelajaran maupun sumberdaya pendukungnya cukup dibicarakan di dalam sekolah dengan masyarakatnya, sehingga tidak perlu diangkat ke tingkat pemerintah daerah apalagi ke tingkat pusat. Tugas pemerintah (pusat dan daerah) adalah memberikan fasilitas dan bantuan pada saat sekolah dan masyarakat menemui jalan buntu dalam suatu pemecahan masalah. Fasilitasi ini mungkin berbentuk capacity building, bantuan teknis pembelajaran atau manajemen sekolah, subsidi bantuan sumberdaya pendidikan, serta kurikulum nasional dan pengendalian mutu pendidikan baik tingkatan daerah maupun nasional. Agar dapat memberikan fasilitasi secara obyektif, pemerintah perlu didukung oleh sistem pendataan dan pemetaan mutu pendidikan yang handal dan terbakukan secara nasional.

Menurut Nurkolis (2005) manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diartikan bahwa manajemen

merupakan proses pengelolaan input-input manajemen untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas.

Selanjutnya Berbasis berarti "berdasarkan pada" atau "berfokuskan pada". Sedangkan Berbasis menurut Nurkolis (2005) berarti dasar atau azas. Sekolah adalah suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas memberikan "bekal kemampuan dasar" kepada peserta didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia; spesifikasi untuk barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa "manajemen berbasis sekolah" adalah pengelolaan input-input manajemen atau sumber daya berdasarkan otonomi yang diberikan kepada sekolah untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok yang dimaksudkan adalah warga sekolah, meliputi: kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, tenaga administratif, orangtua siswa, tokoh masyarakat, para profesional, wakil pemerintahan, wakil organisasi pendidikan.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke tingkat kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke sekolah, dan bahkan dari sekolah ke guru. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendidikan yang diatur secara terpusat (sentralistik) menghasilkan fenomena-fenomena yang disebabkan oleh luasnya cakupan manajemen. Sedangkan melalui desentralisasi proses manajemen akan terfokus oleh karena cakupannya juga kecil (sekolah). Menurut Bailey dalam Slamet, organisasi yang cakupan, pemerintahan, manajemen, dan ukurannya kecil, mudah beradaptasi. Karena itu, desentralisasi bukan lagi merupakan hal penting untuk diterapkan, tetapi sudah merupakan keharusan. Dengan desentralisasi, maka :

- (1) fleksibilitas pengambilan keputusan sekolah akan tumbuh dan berkembang dengan subur, sehingga keputusan dapat dibuat "sedekat" mungkin dengan kebutuhan sekolah;
- (2) akuntabilitas/pertanggung-gugatan terhadap masyarakat (majelis sekolah, orangtua peserta didik, publik) dan pemerintah meningkat;
- dan (3) kinerja sekolah akan meningkat (efektivitasnya, kualitasnya,

efisiensinya, produktivitasnya, inovasinya, provitabilitasnya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moralnya).

Sehubungan dengan otonomi yang harus dimiliki oleh sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, maka proses pengambilan keputusan merupakan hal penting perlu diperhatikan. Kualitas suatu keputusan yang telah diambil sangat ditentukan oleh proses lahirnya keputusan tersebut, apakah keputusan itu hanya datang dari seorang pimpinan saja, pimpinan bersama bawahannya atau keputusan itu lahir dengan melibatkan semua komponen yang punya kepentingan dengan pendidikan itu sendiri. Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu kegiatan dalam implementasi MBS, terutama pengambilan keputusan partisipatif sebagaimana yang dinyatakan Nurkolis (2005) bahwa secara ringkas definisi MBS adalah otonomi manajemen dan pengambilan keputusan partisipatif.

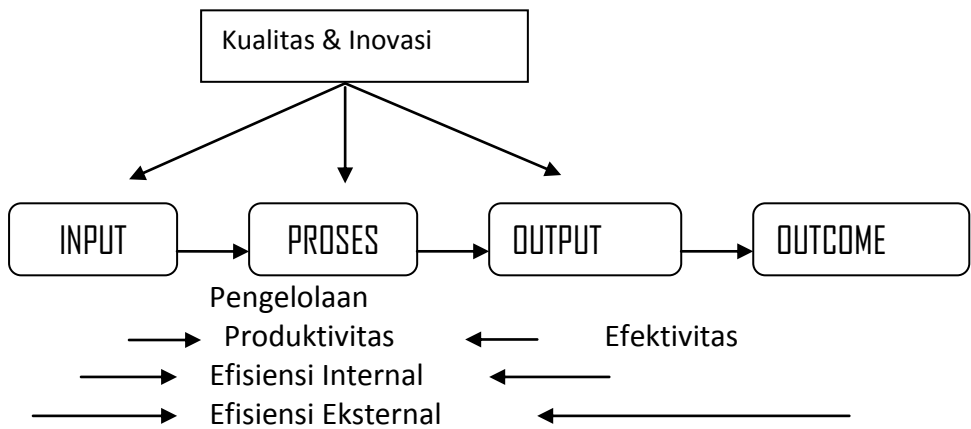
Dari pengertian tersebut, maka pengembangan manajemen berbasis sekolah semestinya mengakar di sekolah, terfokus di sekolah, terjadi di sekolah, dan dilakukan oleh sekolah. Untuk itu, penerapan manajemen berbasis sekolah memerlukan konsolidasi manajemen sekolah.

Menurut Cheng dalam Nurkolis (2005) terdapat empat prinsip MBS yaitu prinsip equifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip pengelolaan mandiri dan prinsip inisiatif sumber daya manusia, yang secara jelas diuraikan sebagai berikut :

1. Prinsip Equifinalitas (Equifinality) yang didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan.
2. Prinsip Desentralisasi (Decentralization). Dasar teori dari prinsip desentralisasi ini adalah manajemen sekolah dalam aktivitas pengajaran menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan.
3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Self-Managing System). Sistem pengelolaan mandiri (self-managing system) di bawah kendali kebijakan dan struktur utama, memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran dan strategi manajemen, mendistribusikan sumber daya manusia dan sumber daya lain, memecahkan masalah dan meraih tujuan menurut kondisi mereka masing-masing.
4. Prinsip Inisiatif Manusia (Human Initiative). Perspektif sumber daya manusia menekankan pentingnya sumber daya manusia sehingga poin utama manajemen adalah untuk mengembangkan

sumber daya manusia di sekolah untuk lebih berperan dan berinisiatif.

Model manajemen berbasis sekolah pada dasarnya ditampilkan menurut pendekatan system, yaitu output-proses-input. Urutan ini dipilih dengan alasan bahwa setiap kegiatan sekolah akan dilakukan, termasuk kegiatan melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat). Pendekatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Sebagai lembaga pendidikan, sekolah harus dikelola secara profesional agar menjadi "sekolah belajar" (learning school) yang mampu menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. Menurut Bovin (1998) dalam Slamet, untuk menjadi sekolah belajar, maka sekolah harus:

- 1) memberdayakan sumber daya manusianya seoptimal mungkin,
- 2) memfasilitasi warga sekolahnya untuk belajar terus dan belajar kembali,
- 3) mendorong kemandirian (otonomi) setiap warganya,
- 4) memberikan tanggungjawab kepada warganya,
- 5) mendorong setiap warganya untuk "mempertanggunggutkan" (account-tability) terhadap hasil kerjanya,
- 6) mendorong adanya teamwork yang kompak dan cerdas dan shared value bagi setiap warganya,

- 7) merespon dengan cepat terhadap pasar (pelanggan),
- 8) mengajak warganya untuk menjadikan sekolahnya customer focused,
- 9) mengajak warganya untuk nikmat/siap terhadap perubahan,
- 10) mendorong warganya untuk berfikir sistem, baik dalam cara berfikir, cara mengelola, maupun cara menganalisis sekolahnya,
- 11) mengajak warganya untuk komitmen terhadap "keunggulan kualitas",
- 12) mengajak warganya untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan
- 13) melibatkan warganya secara total dalam penyelenggaraan sekolah.

Pengelolaan program merupakan pengkoordinasian dan penyerasian program sekolah. Menurut Slamet kegiatan tersebut meliputi: (a) perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program sekolah, (b) pengembangan kurikulum, (c) pengembangan proses belajar mengajar, (d) pengelolaan sumberdaya manusia (guru, karyawan, konselor, dsb.), (e) pelayanan siswa, (f) pengelolaan fasilitas, (g) pengelolaan keuangan, (h) perbaikan program, dan (i) pembinaan hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Untuk menghasilkan output dalam suatu proses belajar mengajar tidak terlepas dari adanya input. Input merupakan segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud tidak harus berupa barang, tetapi juga dapat berupa perangkat dan harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Menurut Slamet dalam Nurkolis (2005) menyatakan bahwa yang tergolong kedalam input tersebut adalah visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, input manajemen, dan input sumber daya.

Selain itu MBS juga memiliki delapan karakteristik yaitu dalam hal misi sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-strategi manajemen, penggunaan sumber-sumber daya, peran warga sekolah, hubungan interpersonal, kualitas para administrator dan indikator-indikator efektivitas. Sementara itu menurut Depdiknas karakteristik berdasarkan konsep MPMBBS terdiri dari: output yang diharapkan, proses dan input.

Dalam mengimplementasikan MBS Mulyasa (2004) menjelaskan beberapa strategi agar MBS dapat terlaksana secara optimal, yaitu pengelompokan sekolah, pentahapan implementasi MBS, dan penyediaan

perangkat implementasi MBS. Mengingat kompleksnya permasalahan yang terdapat dalam dunia pendidikan, maka pentahapan dalam mengimplementasikan MBS sangat diperlukan serta harus ditunjang oleh kemauan politik pemerintah dalam bentuk petunjuk pelaksanaan MBS.

Sehubungan dengan strategi implementasi MBS tersebut, maka kewenangan yang diserahkan kepada sekolah, menurut Depdiknas dalam Nurkolis fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan kepada sekolah tersebut adalah perencanaan dan evaluasi, pengelolaan kurikulum, pengelolaan proses belajar mengajar, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan fasilitas, pengelolaan keuangan, pelayanan siswa, hubungan sekolah-masyarakat, dan pengelolaan iklim sekolah.

Sedangkan Mulyasa (2004) berpendapat bahwa agar MBS dapat berjalan dengan tertib, lancar dan benar-benar terintegrasi dalam suatu system kerja sama untuk mencapai tujuan, sedikitnya terdapat 7(tujuh) komponen yang harus dikelola secara desentralisasi, yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.

Dari kedua pendapat tersebut, walau dengan istilah yang sedikit berbeda ternyata memberikan batasan yang sama tentang komponen yang harus dikelola secara otonomi di sekolah. Adapun komponen tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Perencanaan dan Evaluasi, 2) Pengelolaan Kurikulum, 3) Pengelolaan Proses Belajar Mengajar membaca, 4) Pengelolaan Ketenagaan, 5) engelolaan Fasilitas, 6) Pengelolaan Keuangan , 7) Pelayanan Siswa, 8) Hubungan Sekolah-Masyarakat, 9)Pengelolaan Iklim Sekolah.

### **METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini untuk mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Variabel penelitian adalah implementasi manajemen berbasis sekolah yang terkait dengan prinsip-prinsip, karakteristik dan komponen desentralisasi manajemen berbasis sekolah.

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 11 kota Jambi (sebelumnya berstatus Sekolah Standar Nasional). Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan.



Data yang didapat dari penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Analisis data tersebut dilakukan menggunakan tabel. Penjelasan hasil tabulasi menggunakan keterangan yang didapat melalui wawancara dan studi literatur.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

Implementasi MBS di SMPN 11 kota Jambi serta sebagai model penerapan MBS di kota Jambi dapat dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap guru dan tata usaha. Pengamatan tersebut dilakukan dengan mengukur sejumlah indikator implementasi MBS yang dijabarkan dalam bentuk kisi-kisi serta dioperasionalkan melalui pernyataan-pernyataan.

Berdasarkan data yang diperoleh, kadar implementasi MBS di SMPN 11 kota Jambi adalah 66,44. Hal ini tidak jauh berbeda dari kadar implementasi MBS pada masing-masing indikator, yaitu Prinsip-prinsip MBS = 65,69, karakteristik MBS = 68,01 sedangkan komponen desentralisasi = 65,63.

Prinsip-prinsip MBS memiliki 4(empat) sub indikator, kadar implementasi terendah dari masing-masing sub indikator tersebut terdapat pada ekuifinalitas dengan  $\bar{X}=56,67$ . Kadar implementasi tertinggi terdapat dalam sistem pengelolaan diri dengan  $\bar{X}=72,56$ . Sedangkan sub indikator yang lain memiliki kadar implementasi cukup tinggi, yaitu 67,27 dan 66,27.

Implementasi karakteristik MBS yang dilaksanakan di SMPN 11 kota Jambi secara umum menunjukkan kadar yang tertinggi dibandingkan dengan 2(dua) indikator yang lain. Hal ini juga tergambar pada skor kadar implementasi masing-masing sub indikator karakteristik MBS dengan rentang 64,00 s.d 72,50, dengan kata lain penyebaran skor tersebut relatif sama.

Berbeda dari 2(dua) indikator sebelumnya, indikator desentralisasi memiliki kadar implementasi yang bervariasi untuk masing-masing sub indikator. Hal ini terlihat dari kadar implementasi tertinggi dan terendah untuk semua sub indikator, yaitu kadar implementasi tentang informasi adalah  $\bar{X}=52,50$  dan untuk proses belajar mengajar memiliki kadar implementasi sebesar  $\bar{X}=77,50$ . Selain itu juga bisa dilihat pada sub indikator kekuasaan yang kadar implementasinya hanya 53,77 serta kadar implementasi kurikulum sebesar 76,00.

## Pembahasan

Walau terdapat sedikit perbedaan antara pandangan guru dan pandangan tata usaha terhadap kadar implementasi MBS di SMPN 11 kota Jambi, namun secara umum adalah sama. Perbedaan tersebut terlihat pada salah satu sub indikator prinsip-prinsip MBS, yaitu proses penyelenggaraan MBS, khususnya mengenai keterbukaan dalam manajemen. Menurut pandangan guru, kadar keterbukaan dalam manajemen masih tergolong rendah, yaitu dengan  $\bar{X} = 55$ . Sedangkan menurut pandangan tata usaha, manajemen yang diterapkan di sekolah sudah cukup baik, yaitu dengan  $\bar{X} = 74$ . Perbedaan ini tidak lain disebabkan oleh proses manajemen yang berlangsung di sekolah lebih banyak melibatkan guru, sehingga guru lebih banyak merasakan ketidakterbukaan yang terjadi dalam manajemen sekolah.

Rendahnya tingkat kemandirian dalam pengelolaan sekolah, tidak lain karena sekolah masih terikat dengan aturan-aturan serta budaya lama yang membatasi kewenangan yang dimiliki kepala sekolah. Hal lain yang juga sebagai penyebab rendahnya kemandirian tersebut karena penerapan MBS di sekolah yang merupakan perwujudan dari pemindahan wewenang dari pusat ke level yang paling bawah masing menunggu kerelaan birokrasi pendidikan dari pusat maupun daerah sebagaimana yang dinyatakan Nurkolis (2005) bahwa para birokrat pendidikan dipusat masih enggan untuk melimpahkan kewenangan kepada sekolah secara langsung karena berarti akan merebut lahan mereka. Para pejabat pendidikan di daerah yang baru saja menjabat, lebih-lebih cenderung ingin menguasai pendidikan.

Keterbukaan manajemen, kewenangan dan kemandirian hanya akan terwujud jika dinas pendidikan kota dan provinsi dapat melaksanakan fungsinya sebagai fasilitator sebagaimana yang dinyatakan Sagala (2004) bahwa kebijakan pendidikan dari sentralistik menjadi desentralisasi tersebut akan terwujud jika kantor yang mengurus pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota didisain sebagai fasilitator untuk memberdayakan sekolah dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Praktik yang sering dilakukan selama ini, yaitu dengan melakukan intervensi birokrasi yang berlebihan, tentu sangat mengganggu eksistensi profesionalisme penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil akhir dari penelitian lapangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan MBS di SLTPN 11 kota Jambi sudah sesuai. Artinya penerapan MBS di tersebut telah sesuai dengan teori-teori yang berlaku, khususnya MPMBS yang sedang diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan rata-rata kadar implementasi dengan  $\bar{X} = 66,44$ , serta rata-rata kadar implementasi untuk masing-masing indikator prinsip-prinsip MBS, karakteristik MBS dan Komponen desentralisasi dengan rata-rata masing-masing indikator adalah 65,69, 68,01, dan 65,63.

Sedangkan kalau dilihat dari masing-masing indikator, implementasi prinsip-prinsip MBS sudah bisa sesuai dengan apa seharusnya. Namun pada beberapa subindikator terdapat kadar implementasi yang masih rendah, yaitu : 1) Keterbukaan manajemen, 2) Kewenangan dan Kemandirian, 3) Fleksibilitas pengelolaan, 4) Kekuasaan dan informasi, 5) Kewenangan mengelola keuangan.

Sebaliknya yang memiliki kadar implementasi yang tergolong tinggi adalah : 1) Kewenangan mengembangkan tujuan pembelajaran serta strategi yang efektif, 2) Output yang diharapkan dari proses pembelajaran, 3) Kewenang mengembangkan kurikulum muatan local, 4) Penyelenggaraan proses belajar mengajar.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat dikemukakan beberapa saran antara lain :

1. Hendaknya pemerintah daerah dapat merancang aturan yang jelas mengenai batasan kewenangan yang diberikan kepada sekolah serta rambu-rambu tentang kinerja kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat mengelola manajemen sekolah secara mandiri.
2. Hendaknya dapat menyosialisasikan program MBS keseluruh warga sekolah, sehingga semua komponen tersebut dapat diberdayakan dalam pencapaian tujuan sekolah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2005, ***MBS dalam Praktek***, artikel : <http://www.dikmenu.go.id>.
- Hakim, A., 2004, ***Statitika Deskriptif***, (Yogyakarta : Ekonisia).
- Mulyasa, E., 2004, ***Manajemen Berbasis Sekolah*** (Konsep, Strategi dan Implementasi), (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya).
- Nurkolis, 2005, ***Manajemen Berbasis Sekolah*** (Teori, Model dan Aplikasi) , (Jakarta PT Gramedia )
- Priatmoko, D.H., 2005, ***Reformasi Pendidikan Indonesia ( Suatu Solusi Keluar Dari Krisis)***, Artikel, <http://www.alkausar.com>
- Slamet, PH., ***Manajemen Berbasis Sekolah***, ( Yogyakarta : UNY, \_\_\_\_\_ ).